

**MEKANISME PENYALURAN KREDIT DENGAN PRINSIP 7P PADA PT
BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Angelina Putri Jaskilka Maharani

21210023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

**MEKANISME PENYALURAN KREDIT DENGAN PRINSIP 7P PADA PT
BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Angelina Putri Jaskilka Maharani

21210023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

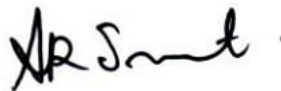
Nama : Angelina Putri Jaskilka Maharani
NIM : 21210023
Program Studi : Akuntansi
Judul : **MEKANISME PENYALURAN KREDIT DENGAN PRINSIP 7P
PADA PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR
CABANG SUKOHARJO**

Disetujui dan Disahkan :

Hari : Senin

Tanggal : 25 November 2024

Pembimbing,



**Ari Susanti, S.Pt., M.M.
NIDN.0323048302**

Mengetahui



**Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN. 0606118902**

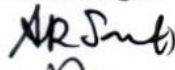
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Angelina Putri Jaskilka Maharani
NIM : 21210023
Program Studi : S1 Akuntansi
**Judul : MEKANISME PENYALURAN KREDIT DENGAN
PRINSIP 7P PADA PT BPR BKK JATENG (PERSERO)
KANTOR CABANG SUKOHARJO**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 2 Mei 2025
Tim Penguji
Penguji 1 : Ari Susanti, S.Pt.,M.M.
Penguji 2 : Dianing Widya Kusumaastuti, S.Ak.

Tanda Tangan

()
()

Mengetahui

Ketua STIE Surakarta



Aditya Lilivan, S.M.B., M.M.

NIDN.0606118902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**MEKANISME PENYALURAN KREDIT DENGAN PRINSIP 7P PADA PT
BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG SUKOHARJO**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima

Sukoharjo, 7 November 2024



Angelina r'utri Jaskulka

21210023

**MEKANISME PENYALURAN KREDIT DENGAN PRINSIP 7P
PADA PT BPR BKK JATENG
(PERSERODA) KANTOR CABANG SUKOHARJO**

ANGELINA PUTRI JASKILKA MAHARANI

21210023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran kredit pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kota Sukoharjo pada bulan Maret-Mei 2024. Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada informan yang merupakan Kepala Bidang Operasional dan Analis Kredit. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya prinsip 7P yang diterapkan di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo mampu menjadi acuan dalam mekanisme penyaluran kredit serta mampu mencegah terjadinya kredit macet.

Kata Kunci: Mekanisme Penyaluran Kredit, Prinsip 7P, Bank

***CREDIT DISTRIBUTION MECHANISM USING 7P PRINCIPLES
AT PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SUKOHARJO BRANCH OFFICE***

ANGELINA PUTRI JASKILKA MAHARANI

21210023

ABSTRACT

This research aims to determine the credit distribution mechanism at PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Sukoharjo Branch Office. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach carried out in Sukoharjo City in March-May 2024. The data in this research consists of primary data and secondary data. Primary data in this research was obtained through interviews with informants who were Heads of Operations and Credit Analysts. Data collection in this research used in-depth interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique in this research uses an interactive model data analysis technique which includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research found that the 7P principles implemented at PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Sukoharjo Branch Office were able to become a reference in the credit distribution mechanism and were able to prevent bad credit from occurring.

Keywords: Credit Distribution Mechanism, 7P Principles, Bank

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sekalipun kamu merasa prosesmu jauh lebih lambat dibandingkan yang lain
namun tetaplah terus melangkah dengan penuh keyakinan serta mengusahakan
yang terbaik “

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat

Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Kupersembahkan karya tulis sederhana ini

Untuk Papa dan Mamaku (Bp. Yan Apriawan – Ibu Kurniatri Asih) tercinta yang
selalu mendukung dan senantiasa mendoakan.

Terima kasih

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyaluran Kredit Dengan Prinsip 7P Pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang 1 (S1) Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan setulus hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M. M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Ibu Ari Susanti, S. Pt., M. M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta Bapak dan Ibu Karyawan yang telah memberikan sarana prasarana selama proses perkuliahan
4. Bapak dan Ibu yang bekerja di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan magang, proses penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, yang bermanfaat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.
5. Papa, Mama, dan Adikku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti mengalir dalam penyelesaian skripsi ini
6. Teman-temanku Tiara Jesika, Ardelia Kartika dan Oryza Asha yang telah memberikan dukungan semangat, selalu membantu, menemani selama perkuliahan penulis dari semester awal hingga penyusunan skripsi ini

7. Temanku Cindhy Paramitha, yang juga telah memberikan dukungan semangat, membantu dan menemani penulis dari awal magang hingga penyusunan skripsi
8. Teman-teman akuntansi angkatan 21 yang selalu memberikan dukungan semangat dan telah menemani proses perkuliahan
9. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu
10. Serta diri sendiri yang telah berusaha keras selama proses penelitian ini yang telah mencoba dan belajar dari kesalahan serta tidak patah semangat

Skripsi yang jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sukoharjo , 7 November 2024

Peneliti

Angelina Putri Jaskilka

21210023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Objek Penelitian.....	39
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Penentuan Informan /Narasumber	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Uji Kredibilitas.....	42
G. Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan	43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum PT BPR BKK JATENG (Perseroda)	45
B. Analisis Data	52
C. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penyaluran Kredit Dalam 3 Bulan	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3 Pemilihan Informan.....	41
Tabel 4 Rincian Biaya Rekening.....	47
Tabel 5 Suku Bunga Deposito.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Berpikir	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara Narasumber 1
- Lampiran 3. Transkrip Wawancara Narasumber 2
- Lampiran 4. Formulir Permohonan Kredit
- Lampiran 5. Surat Perjanjian Kredit
- Lampiran 6. Produk - Produk Bank
- Lampiran 7. Data *Net Performing Loans (NPL)*
- Lampiran 8. Foto Bersama Ibu Henny Setyowati S.E Selaku Kepala Bidang
Operasional
- Lampiran 9. Foto Bersama Bapak Eko Pramono S.E Selaku Analis Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan lembaga keuangan tumbuh dengan pesat. Perbankan terutama di bidang perkreditan, memiliki peranan yang sangat dominan dan penting. Dunia perbankan pun turut berkembang dan menuntut persaingan yang ketat antar sesama bank. Semua berusaha untuk mendapatkan banyak nasabah dan memperoleh keuntungan setinggi mungkin. Menurut Putri & Yunita (2024) bahwa bank adalah lembaga keuangan sebagai tempat bagi individu, badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana. Kegiatan utama bank adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan yang kemudian dikelola dengan cara menyalurkannya dalam bentuk investasi dan pemberian kredit kepada perorangan, badan usaha swasta, atau pemerintah.

Bank memperoleh keuntungan berupa deviden atau pendapatan bunga yang dapat digunakan untuk membayar biaya operasional termasuk gaji para pegawai dan mengembangkan kegiatan usahanya. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah memberdayakan peranan jasa perbankan, Penerbitan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui

reformasi sektor keuangan Indonesia. Salah satu isu yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Pelindungan konsumen dipandang sebagai suatu persyaratan yang perlu diperkuat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya stabilitas sektor keuangan. Berbagai pengaturan terkini yang diatur dalam UU P2SK secara spesifik belum tercantum dalam pengaturan yang ada saat ini di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Demikian pula dengan terbitnya UU PDP maka perlu ditinjau kembali substansi pengaturan mengenai pelindungan data serta adanya update G20/OECD *High Level Principles on Financial Consumer Protection*. Bank Indonesia perlu menyesuaikan dan mengatur kembali mengenai aspek-aspek perlindungan konsumen yang berada dalam cakupan kewenangan Bank Indonesia, agar dapat sejalan dan mendukung penerapan UU tersebut.

Sektor yang bergerak pada bidang perbankan yang telah *go public* dan suatu entitas ekonomi bank memberi laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan yang akan digunakan investor untuk memprediksi potensial penerimaan kas dari dividen dan bunga. Jumlah tunggakan kredit yang cukup besar merupakan beban yang berat dan berdampak langsung pada aktivitas perbankan sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang merupakan faktor penghambat dalam pengembangan usaha.

Menurut Zhafirah *et al.*, (2024) memaparkan bahwa sistem penyaluran kredit yang diterapkan di bank terbagi dari prosedur yang diselaraskan pada pola yang teratur dalam melaksanakan aktivitas bank. Upaya melaksanakan prosedur kredit yang ditangani terdapat langkah-langkah sebagai berikut: pengajuan kredit nasabah, melaksanakan penyelidikan dan analisis pihak bank yang akan melakukan pengambilan keputusan mengenai permohonan kredit yang diajukan apakah disetujui ataupun ditolak karena alasan tertentu, administrasi dilakukan saat proses pencairan kredit serta senantiasa mengawasi/memonitoring nasabah yang telah disetujui kreditnya dan berkewajiban untuk melunasi kredit kepada pihak bank. Menurut Saputro (2023) penyaluran kredit bank lebih lambat dari simpanan nasabah karena pertumbuhan kredit jauh lebih rendah dibandingkan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang artinya kemampuan nasabah menyetor uang lebih tinggi daripada penyaluran kredit yang dilakukan. Bank sudah seharusnya mengoptimalkan dalam penyaluran kredit kepada nasabah. Semakin besar bank menyalurkan kredit maka semakin besar pula keuntungan bank dari bunga yang diterima. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan utama perbankan didapatkan dari selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan. Itulah alasan terpenting mengapa kredit sangat penting bagi sebuah bank. Semakin besar pinjaman yang diberikan maka semakin besar pula bunga yang diterima. Kualitas kredit yang baik sangat membantu bank dalam meningkatkan keuntungan.

Perkreditan sangat dan akan selalu dibutuhkan bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya maupun bagi mereka yang hendak memulai usaha. Kredit memegang peranan penting dalam ekonomi. Bank memberikan fasilitas kredit yaitu pendapatan terbesar dari resiko kerugian, sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik akan merugikan bagi pihak bank. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan dari pihak bank kepada debitur. Tentunya pihak bank akan memberikan pinjaman kepada debitur apabila mereka sudah yakin bahwa debitur dapat membayar seluruh pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati., tanpa keyakinan itu pihak bank tidak akan memberikan pinjamannya. Kredit yang diberikan bank tidak menutup kemungkinan adanya resiko, sehingga bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip kredit yang ada serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar penyaluran kredit dapat dilakukan secara konsisten dan terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip kredit yang ada. Berikut merupakan data penyaliran Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo Dalam 3 Bulan:

Tabel 1. Penyaluran Kredit Dalam 3 Bulan

Bulan	RBB	Realisasi	%
Februari	47.097.565	46.038.083	0,98
Maret	48.044.696	47.355.343	0,99
April	48.554.683	46.822.085	0,96

Sumber: Data Diolah Sekunder 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah kredit yang disalurkan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo lebih rendah daripada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah dianggarkan. Penyaluran kredit tidak berjalan maksimal karena beberapa faktor seperti terkendalanya saat proses *BI*

Checking dan survey di lapangan yang mempengaruhi proses penilaian kredit. Kemudian faktor lain yang menjadi hambatan seperti persaingan antar bank dalam segi bunga, berkas-berkas yang tidak segera dilengkapi dan bagian pemasaran kurang menjangkau masyarakat. Faktor-faktor ini tentunya menghambat proses pengajuan kredit yang akan mempengaruhi jumlah kredit yang terealisasi, menyebabkan jumlah kredit yang terealisasi tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah dianggarkan.

Salah satu hal yang banyak ditemukan dalam perbankan yaitu bahwa tidak hanya menyalurkan kredit saja melainkan mengharapkan kredit tersebut kembali dalam jangka waktu dan bunga yang telah disepakati antar pihak bank dan debitur karena hal ini dapat menggolongkan bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya berjalan baik dan lancar serta mengalami peningkatan kualitas. Kredit yang merupakan bisnis utama bank sekaligus menjadi resiko terbesar bagi bank apabila tidak mengantisipasinya. Timbulnya kerugian dalam perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet. Faktor lainnya karena kurang mendalamnya analisis yang dilakukan sebelum kredit diberikan. Analisis kredit atau penilaian kredit adalah proses yang dilalui untuk menganalisis suatu permohonan kredit yang diajukan calon debitur, sehingga memberi keyakinan pihak bank bahwa calon debitur dinilai layak.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah yang dimana nasabah tidak melakukan pembayaran atau angsuran sesuai perjanjian yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah

Rahayu *et al.*, (2021). Kredit macet menurut Ismail dalam Ajeng *et al.*, (2020) memaparkan bahwa kredit bermasalah merupakan keadaan yang mana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh hutangnya kepada bank seperti yang telah disepakati. Menurut Hasibuan dalam Ajeng *et al.*, (2020) kredit macet merupakan kredit yang pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur. Menurut Wijoyo (2020) kredit macet merupakan risiko dalam pemberian kredit sehingga bank berupaya menghindari kredit macet. Kredit macet merupakan kesulitan bagi pihak bank sendiri karena menyangkut tingkat kesehatan bank dan mempengaruhi laporan keuangannya. Kredit bermasalah atau macet menjadi dampak buruk bagi pihak bank karena mengakibatkan kerugian akibat dana yang disalurkan tidak kembali dan bunga yang seharusnya diterima namun tidak bisa serta mengakibatkan bank mengalami penurunan pendapatan dan harus mencadangkan dana.

Kredit macet yang terjadi mengakibatkan riwayat keuangan individu/organisasi tersebut mendapat citra yang buruk dan berdampak apabila mereka mengajukan di tempat lain suatu saat nanti. Penyebab utama dari kredit macet sendiri berasal dari pihak bank. Perlu diketahui setiap layanan keuangan/perbankan menawarkan kredit, pasti ada resiko yang melekat didalamnya. Setiap manusia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa mendatang dan ditambah kondisi yang mungkin akan terjadi dan bersifat tidak pasti. Walaupun tidak bisa menghilangkan sepenuhnya resiko tersebut, tetapi sebagai pihak bank terutama analis kredit yang menilai

karakteristik debitur bisa mengurangi terjadinya resiko tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada.

Kondisi kredit macet juga bisa datang dari pihak debitur atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Biasanya pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet disebabkan karena mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, mulai dari penurunan gaji yang dimiliki sampai terancam terkena PHK, adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, bisa jadi penurunan omzet penjualan karena sepi pembeli, atau memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu karena adanya hal mendesak lainnya.

Menurunnya aktivitas ekonomi dan tingginya suku bunga kredit pun mempengaruhi kredit macet. Kredit macet yang meningkat mempengaruhi struktur permodalan pihak perbankan. Cara yang dapat dilakukan dengan meningkatkan porsi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Pihak perbankan meningkatkan struktur permodalannya, maka hal tersebut akan mengurangi kemampuan pihak bank untuk melakukan ekspansi kredit terhadap sektor riil secara otomatis. Sehingga hal tersebut akan mempersulit setiap sektor industri untuk melakukan peminjaman kredit.

Menurunnya kemampuan tersebut jelas akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara karena negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Hal tersebut

juga akan berimbas negatif pada krisis global maka sumber terbaik lainnya yang diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi adalah kredit perbankan. Beberapa catatan statistik beberapa tahun kebelakang menunjukkan bahwa kontribusi dari kredit perbankan terbukti mampu meningkatkan perkembangan ekonomi hingga 20% banyaknya. Kondisi kredit macet yang terjadi akan membuat bank menekan adanya pengajuan kredit, dan mereka akan kehilangan minat untuk menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor yang mampu membantu perkembangan ekonomi.

Banyaknya varian kredit yang ditawarkan memudahkan masyarakat memperoleh dana usaha, pendidikan, kredit rumah/renovasi, dan lainnya. Masyarakat mengajukan kredit dengan ketentuan dan syarat yang ada. Prinsip kredit yang digunakan sangat membantu mengetahui kelayakan debitur dengan tepat, jika hendak mengajukan kredit harus dipastikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka peluang mendapat persetujuan lebih kecil. Seperti yang disebutkan diatas, terdapat beberapa prinsip yang digunakan sebagai penentu apakah kredit tersebut disetujui.

Uraian dari prinsip 7P adalah *personality* (karakter), *purpose* (tujuan), *party* (pengelompokan), *payment* (pembayaran), *prospect* (prospek), *profitability* (profitabilitas), dan *protection* (perlindungan). Perlu diketahui bahwa pihak bank memberikan persetujuan kredit dengan acuan 5C dan 7P. Prinsip 7P ini penting dalam menentukan kelayakan calon debitur. Prinsip ini untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar serta sangat penting

untuk menghindari risiko kredit seperti cicilan macet. Agar kredit yang diajukan dapat disetujui, perlu memenuhi kriteria yang ada pada prinsip-prinsip tersebut. Kriteria dibuat tidak hanya untuk melindungi pihak bank, tetapi juga melindungi nasabah agar mengetahui kemampuan kredit yang sesuai.

Kriteria yang tidak terpenuhi memiliki arti bahwa nasabah belum memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang diajukan. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir kerugian dan permasalahan seperti kredit yang macet atau kredit yang gagal dilunasi. Upaya agar kredit yang diajukan dapat disetujui, maka perlu memenuhi kriteria yang ada pada prinsip-prinsip tersebut.

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman disertai bunga. Lembaga ini berupaya menjadi bank yang dipercaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) berpusat di Semarang Jawa Tengah dan memiliki beberapa kantor di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan memiliki beberapa kantor kas di masing-masing Kabupaten/Kota.

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo sudah berdiri sejak bulan Juli 2019 atas hasil konsolidasi. Hal ini menjelaskan bahwa sudah beroperasi sendiri dan membawahi 5 kantor kas seperti Kantor Kas (Kankas) Tawangsari, Kankas Bulu, Kankas Nguter, Kankas Gatak,

Kankas Weru. Dengan adanya berbagai Kankas diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok dan membantu mereka yang membutuhkan pinjaman untuk berbagai keperluan. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan ada 2, dalam bentuk penyaluran dana (kredit) dan penghimpun dana (simpanan). Berikut merupakan beberapa produk pinjaman yang ada: Kredit Umum BKK (KUB), Kredit Joglo Mitra, Kredit BKK Agro, Kredit BKK Bahari, Kredit KPP, Kredit Kolektif Karyawan (K3), Kredit BKK Joglo, Kredit Mikro BKK((KMB), dan BKK Sinden. Kemudian untuk simpanan dibagi menjadi 2 yaitu tabungan dan deposito. Produk tabungan sendiri terdapat beberapa jenis seperti Tabungan Kredit BKK, BKK Prioritas, Tabungan Siswa (TAWA) dan TAMADES. Lalu untuk deposito terdapat deposito berjangka dimana terdapat jangka waktu tertentu (3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau bisa diperpanjang lagi). Produk yang banyak diajukan Kredit Umum BKK (KUB), Kredit BKK Joglo, dan Kredit Mikro BKK (KMB). Kemudian untuk simpanan yang paling banyak digunakan Tabungan Kredit BKK, Tabungan Siswa (TAWA), dan TAMADES.

Analisis kredit dapat dilakukan dalam menentukan kelayakan debitur dengan menggunakan prinsip 7P. Prinsip analisis menggunakan 7P ialah *personality* (Karakter), *Party* (pengelompokan), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (Prospek), *Payment* (Pembayaran), *Profitability* (Profitabilitas), dan *Protection* (Perlindungan). Prinsip ini untuk mengetahui kemampuan debitur yang sangat penting untuk menghindari risiko kredit seperti cicilan macet. Upaya agar kredit yang diajukan dapat disetujui, kamu perlu memenuhi

kriteria yang ada pada prinsip-prinsip tersebut. Kriteria ini dibuat tidak hanya untuk melindungi pihak bank, tetapi juga melindungi nasabah agar mengetahui kemampuan kredit yang sesuai.

Kriteria yang tidak terpenuhi memiliki arti bahwa nasabah belum memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang diajukan. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir kerugian dan permasalahan seperti kredit yang macet, atau kredit yang gagal dilunasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **”MEKANISME PENYALURAN KREDIT DENGAN PRINSIP 7P PADA PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG SUKOHARJO”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo?
2. Bagaimana penerapan prinsip 7P dalam penyaluran kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo?
3. Apakah hambatan dalam penyaluran kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme penyaluran kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Suakoharjo.

2. Menganalisis penerapan prinsip 7P dalam penyaluran kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo.
3. Mengetahui hambatan dalam penyaluran kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan kajian terhadap mekanisme penyaluran kredit dengan prinsip 7P.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyaluran dana yang ada, sehingga perusahaan dapat membuat strategi baru untuk meningkatkan permintaan kredit nasabah.

3. Pengembangan Diri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai mekanisme penyaluran kredit dengan prinsip 7P.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Bank

Menurut Putri & Yunita (2024) bahwa bank adalah lembaga keuangan sebagai tempat bagi individu, badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana. Bank merupakan perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada debitur. Bank memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan tabungan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan debitur. Bank melakukan berbagai kegiatan seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, penyimpanan barang/surat-surat berharga, membiayai usaha, dan sebagainya. Bank tidak hanya memberikan pinjaman pada kegiatan usahanya, melainkan lebih dari itu. Bank memiliki tanggung jawab atas surat-surat/ barang berharga debitur yang biasanya dijadikan jaminan oleh debitur untuk mendapatkan pinjaman. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi pihak bank sendiri.

Menurut Mutiara (2023) bank merupakan usaha untuk menghimpun atau mengumpulkan serta menyalurkan kembali dana

tersebut yang berupa simpanan kepada masyarakat luas guna memenuhi dan menunjang ekonomi. Bank merupakan salah satu dari beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan bagi perkembangan ekonomi di negara menurut Ismail dalam Zhafirah *et al.*, (2024). Sementara menurut Hastuti (2022) bahwa bank merupakan jenis lembaga yang melakukan beragam usaha meliputi memberi pinjaman, menyediakan mata uang, monitoring mata uang, pembiayaan usaha, tempat penyimpanan barang berharga, dan lain sebagainya. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 fungsi bank sebagai berikut:

- 1) Penghimpun dana yaitu bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar terdapat tiga sumber, yaitu:
 - a. Dana yang bersumber dari bank berupa setoran modal waktu berdiri.
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat yang dikumpulkan dari usaha perbankan seperti simpanan giro, deposito dan tabungan.
 - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana

yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Ada beberapa bank yang dilikuidasi atau dibekukan usahanya salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit macet.

- 2) Penyalur dana yang dimana dananya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, dan kepemilikan aset tetap.
- 3) Pelayan jasa bank yang dalam mengembangkan tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Perbankan dalam menjalankan usahanya, menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 berdasarkan jenis usahanya dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
- c. Bank Sentral yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu

negara dan mempertahankan konversi uang terhadap emas/perak atau keduanya.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan perbankan yang melakukan penyaluran kredit kepada kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sumber utama untuk memperoleh laba dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan pendapat Yasin & Fisabilillah (2021). Menurut Sofyan (2021) BPR adalah bank yang kegiatannya terbatas dan sederhana meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan diberikan lantaran tujuan utama pelayanan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam pelaksanaan kegiatannya. Menjalankan kegiatannya dengan prinsip Syariah. BPR menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang serupa. Pihak bank perlu meningkatkan kinerja agar lebih optimal. Pihak bank perlu mewaspadaai penurunan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan BPR. Penurunan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berupa tabungan dan deposito akan meningkatkan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai akibat rendahnya BPR melakukan penyaluran kredit kepada masyarakat menurut Yasin & Fisabilillah (2021). Menurut Candra *et al.*, (2023) dalam usaha perbankan

tumbuh dengan pesat calon nasabah dihadapkan dengan berbagai pilihan sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai penetapan kredit, tabungan dan deposito. Pihak bank akan berusaha keras untuk mengeluarkan beragam produk untuk menarik nasabah seperti turunkan suku bunga kredit dan menaikkan suku bunga tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1990 Pasal 5 ayat 1 kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.
- b. Memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip yang sesuai dengan ketentuan.
- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

Berikut ini adalah usaha-usaha yang tidak diperkenankan bagi BPR menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1990 Pasal 5 ayat 1:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam Lalu Lintas Pembayaran (LLP).
2. Melakukan kegiatan usaha valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana mestinya.

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dilakukan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI
- c. Pemerintah Daerah
- d. Dua pihak atau lebih

3. Kredit

Menurut Zhafirah *et al.*, (2024) kredit berasal dari bahasa latin “*Credere*” yang artinya kepercayaan. Kreditur akan mempercayakan sejumlah uang kepada penerima kredit atau debitur bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai tempo yang diberikan. Pihak bank percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Menurut Kasmir dalam Rangian *et al.*, (2021) “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur untuk mengembalikan uang atau tagihan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sementara menurut Mulyono dalam Hastuti (2022) kredit merupakan kemampuan melakukan suatu pengadaan untuk pinjaman dengan kesepakatan pembayaran yang ditentukan. .

Menurut Hasibuan dalam Rangian *et al.*, (2021) kredit merupakan hal dalam menerima kewajiban serta melakukan pembayaran pada waktu yang diperjanjikan. Kredit pada dasarnya merupakan kegiatan penghimpunan dana dari debitur dalam berbagai bentuk (giro, tabungan, dan deposito) kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan berbagai bentuk produk kredit disesuaikan kebutuhan. Debitur wajib

mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Debitur mengembalikan pinjaman dengan cara diangsur/dicicil disertai bunga sesuai kesepakatan perjanjian kredit.

Beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pihak maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah reputasi yang dimiliki oleh debitur yang memungkinkan untuk memperoleh uang, dari kreditur serta akan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian kredit dari kedua belah pihak. Selain itu, kredit dapat berupa uang dan tagihan misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian aset berupa mobil dan rumah. Nantinya debitur akan menerima sejumlah uang dengan nominal dan bunga yang telah disepakati untuk membiayai rumah dan mobil. Kesepakatan antara bank dan debitur lewat perjanjian kredit yang bermaterai, dalam perjanjian kredit ada hal dan kewajiban pihak terkait meliputi jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama. Plafond kredit yang besar memerlukan pengikatan dengan notaris dan debitur akan dikenakan sanksi bila melanggar isi perjanjian.

Menurut Sasmita *et al.*, (2021) kredit macet adalah resiko dari adanya penyaluran kredit yang dilakukan dan tidak dapat dihindari. Bank akan berusaha keras untuk meminimalisir kredit macet, kredit macet timbul karena indikasi debitur tidak membayar angsuran tepat waktu juga prosedur yang tidak layak dan disebabkan beberapa faktor.

Perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan Bank Syariah yaitu jika Bank Konvensional berorientasi pada bunga sedangkan Bank Syariah dengan imbalan bagi hasil. Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu dan tentunya tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan pemberian kredit menurut Kasmir dalam Hastuti (2022) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika bank yang terus-menerus menderita kerugian maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi maupun dana untuk modal kerja. Dana tersebut dapat mengembangkan dan memperluas usaha debitur.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir dalam Hastuti (2022) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang

Fungsi uang tidak hanya disimpan tetapi dengan diberikannya kredit maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat dipergunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit juga bisa meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Penyaluran kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit juga dapat membantu dalam

mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang modalnya terbatas.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti memberi membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Mengenai pinjaman internasional dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

4. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir dalam penelitian Octavia (2022) kredit dibagi menjadi 5 kelompok:

1) Dari segi agunan

a) Kredit investasi

Kredit yang diberikan untuk kepentingan investasi, pembangunan pabrik, rumah, pengadaan mesin, tanah, dan lainnya dalam jangka waktu panjang.

b) Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan untuk kepentingan modal kerja, misal pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya dalam jangka waktu pendek satu kali siklus operasi.

2) Berdasarkan tujuan kredit :

a) Kredit produktif

Kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu baik barang dan jasa, misal ada disektor industri, pertanian dan lainnya

b) Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi, misalnya membeli kendaraan, rumah dan kepentingan lainnya

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan bagi para pedagang, biasanya untuk modal dagangan yang nanti pembayarannya dari hasil penjualan

3) Berdasarkan jangka waktu :

a) Kredit jangka pendek

Kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Kredit jangka waktunya 1 tahun sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi.

c) Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktunya paling lama dan jangka waktu pengembalian di atas 3 tahun atau 5 tahun.

4) Berdasarkan jaminan :

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan jaminan berupa barang berwujud seperti sertifikat rumah/ tanah lalu bisa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor/ mobil dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kredit.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan reputasi calon debitur.

5) Berdasarkan sektor usaha :

a) Kredit pertanian

Kredit yang digunakan untuk sektor perkebunan atau pertanian dalam bentuk kredit jangka panjang ataupun jangka pendek.

b) Kredit peternakan

Kredit yang digunakan untuk mengembangkan usaha peternakan yang biasanya dalam bentuk kredit jangka pendek.

c) Kredit industri

Kredit yang digunakan untuk membiayai sektor industri kecil, menengah, atau besar.

d) Kredit pertambangan

Kredit ini biasanya diberikan dalam jangka panjang.

e) Kredit pendidikan

Kredit yang digunakan untuk membiayai pendidikan bagi mahasiswa.

f) Kredit profesi

Kredit ini diberikan kepada para profesional.

g) Kredit perumahan

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian rumah/ lahan.

h) Dan sektor-sektor lainnya.

Berikut merupakan alasan kenapa pinjaman dibutuhkan ada beberapa aspek yaitu :

- 1) Pembiayaan stok barang, menambah bahan baku, bahan setengah jadi maupun jadi
- 2) Pemasok mempercepat waktu pembayaran dari tanggal seharusnya dan dibayar *cash*
- 3) Kondisi dimana jangka waktu pembayaran dari *customer* diperlambat dari biasanya 2 bulan menjadi 3 bulan
- 4) Cadangan modal kerja
- 5) Investasi

- 6) *Relokasi* tempat usaha
- 7) *Modernisasi* mesin
- 8) *Ekspansi*
- 9) Diversifikasi produk dan usaha

5. Mekanisme Kredit

Mekanisme kredit menurut Moenir dalam Maharani (2024) adalah rangkaian pekerjaan yang digunakan untuk menyelesaikan proses kerja dengan tujuan yang maksimal. Sementara menurut Maharani (2024) mekanisme adalah rangkaian pedoman untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses kerja antar bagian. Mekanisme kredit merupakan serangkaian pekerjaan sesuai pedoman yang ada untuk menyelesaikan proses kerja dengan tujuan semaksimal mungkin. Mekanisme kredit memiliki urutan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap untuk pengajuan kredit jadi bukan merupakan proses yang singkat.

Mekanisme pemberian kredit oleh badan menurut Kasmir dalam Istirana (2020) sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas

Permohonan kredit yang diajukan dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampirkan dengan berkas pendukung lainnya.

1) Pengajuan Proposal hendaknya berisi:

- a) Latar belakang perusahaan

Berisi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak pemerintah dan swasta yang termasuk mengerjakan usahanya.

b) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau peningkatan kapasitas produksi ataukah mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

Permohonan yang diajukan menentukan besarnya kredit yang diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian mengenai kelayakan kredit dan jangka waktu dinilai dari *cash flow* serta laporan keuangannya tiga tahun terakhir. Menentukan jumlah kredit yang diberikan.

d) Cara permohonan mengembalikan kredit

Bagaikan cara nasabah mengembalikan kredit yang diberikan apakah dari hasil penjualan atau gaji yang dimiliki.

e) Jaminan kredit

Jaminan yang diberikan dapat menutup segala risiko kemungkinan kredit macet, baik adanya unsur kesenjangan atau lainnya. Penilaian mengenai jaminan kredit harus teliti dan jaminan diikat oleh asuransi tertentu.

2) Melampirkan dokumen *fotocopy* yang meliputi:

a) Akte notaris

Digunakan untuk perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas)

b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang.

c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Setiap pemberian kredit wajib di pantau Bank Indonesia untuk NPWP nya.

d) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir

Digunakan untuk menilai kelayakan dari bisnis yang dijalankannya.

e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f) Sertifikat jaminan

3) Penilaian yang dapat dilakukan untuk sementara adalah neraca dan laporan laba rugi yang menggunakan beragam rasio seperti:

1) *Current ratio*

2) *Acid test ratio*

3) *Inventory turn over*

4) *Sales to receivable ratio*

5) *Profit margin ratio*

6) *Return on net worth*

7) *Working capital*

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Bertujuan mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai ketentuan yang ada, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak belum cukup maka nasabah harus segera melengkapinya dan apabila nasabah tidak segera melengkapi maka permohonan kredit akan dibatalkan.

c. Wawancara awal

Penyelidikan kepada nasabah secara langsung. Untuk meyakinkan bank apakah berkas sudah lengkap seperti yang ditentukan. Wawancara untuk mengetahui kebutuhan nasabah dan karakter nasabah. Hasil wawancara diharapkan sesuai dengan tujuan dengan informasi yang diberikan.

d. *On the spot*

Pemeriksaan secara langsung ke lapangan dengan meninjau objek usaha atau jaminan. Hasil *on the spot* akan dibandingkan dengan hasil wawancara awal dan saat melakukan ini diharapkan tidak memberitahu nasabah untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

e. Wawancara II

Kegiatan perbaikan berkas apabila masih ada kekurangan saat *on the spot* di lapangan. Hasil dari permohonan dan wawancara awal akan dibandingkan dengan saat *on the spot* apakah sudah sesuai atau belum.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit untuk menentukan apakah kredit yang diberikan disetujui atau ditolak, jika disetujui maka mempersiapkan administrasinya, keputusan kredit mencakup:

- 1) Jumlah kredit yang diterima
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
- 4) Waktu pencairan kredit

Keputusan kredit adalah keputusan tim apabila ditolak harus menyertakan alasan kredit ditolak.

g. Penandatanganan akad kredit

Kelanjutan dari putusan kredit maka sebelum kredit dicairkan nasabah harus menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan, penandatanganan dilakukan :

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung
- 2) Dengan notaris

h. Realisasi kredit

Realisasi diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Penarikan dana dari rekening sebagai realisasi dari pihak bank dan dapat diambil sesuai ketentuan kredit secara sekaligus maupun bertahap.

Menurut Thomas Suyatno dalam Hastuti (2022) analisis kredit merupakan pekerjaan yang meliputi :

- a. Mempersiapkan pekerjaan yang merupakan penguraian dari berbagai aspek, baik dari segi keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dari permohonan kredit yang diajukan .
- b. Menyusun laporan analisis yang berisi penguraian penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit

Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidikan dan analisis. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh penyidik analisis. Pembagian kerja tersebut ada apabila organisasi bagian kredit memungkinkannya. Setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas mengenai pembagian kerjanya agar dapat berjalan dengan baik setiap proses kerja yang dijalankan.

6. Prinsip 7P

Pihak bank memerlukan analisis terhadap usaha debitur mengenai pengajuan permohonan kredit untuk mengambil keputusan mengenai pinjaman. Salah satu cara menilai usaha debitur dengan menggunakan prinsip 7P untuk menilai kemampuan usaha debitur. Dalam memberikan

kredit pihak bank harus yakin dan percaya bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan. Keyakinan berasal dari proses penilaian kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit. Pihak bank

Analisis penerapan kredit dengan menggunakan prinsip 7P menurut Kasmir dalam Rangan *et al.*, (2021) terdiri dari:

1) *Personality* (kepribadian)

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau perilaku sehari-hari bahkan masa lalunya. *Personality* juga dapat meliputi sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party* (pengelompokan)

Mengelompokkan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Sehingga nasabah dapat dikelompokkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose* (tujuan)

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit nasabah dapat bermacam-macam.

4) *Prospect* (prospek)

Menilai usaha nasabah di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai memiliki prospek, maka dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi nasabah dan juga bagi pihak bank.

5) *Payment* (pembayaran)

Ketersediaan sumber pembayaran kredit dari calon debitur serta apakah setelah pemberian kredit debitur punya sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit.

6) *Profitability* (profitabilitas)

Analisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari waktu ke waktu untuk perkembangannya terutama setelah mendapatkan suntikan dana yang berasal dari kredit.

7) *Protection* (perlindungan)

Mengantisipasi jika terjadi hal yang di luar dugaan hingga diperlukan perlindungan terhadap kredit dari kelompok perusahaan, jaminan atau *holding company*

Pihak kreditur memerlukan analisis terhadap usaha debitur yang mengajukan permohonan kredit dalam pengambilan keputusan pencairan pinjaman tersebut. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha debitur.

Adapun prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 7P, dengan menggunakan salah satu dari ketiga prinsip tersebut, maka kreditur dapat menilai sejauh mana debitur dapat dipercaya untuk mendapatkan hutang hingga mampu memberikan keuntungan pada bank.

7. Hambatan Kredit

Bank tidak memiliki informasi mengenai UMKM potensial yang dapat dibiayai. Persyaratan kredit UMKM yang ketat karena adanya ketentuan terkait *risk management bank* yang berhubungan dengan permodalan bank. Kesulitan permodalan UMKM perlu didukung dengan berbagai kebijakan dan alternatif yang mendorong peningkatan akses pembiayaan. Akses pembiayaan didukung dengan penguatan kelembagaan dan kapasitas UMKM agar usaha dapat lebih kuat dan *sustain*

UMKM sebagai calon debitur, juga memiliki kendala dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya persepsi risiko tinggi, kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan kredit, UMKM cenderung tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai dan kurangnya literasi keuangan. Kurangnya dana dari pusat untuk menambah modal yang ada serta *ekspansi* yang tidak diimbangi modal. Hambatan lainnya terkait masalah suku bunga yang dinilai cukup tinggi serta harus adanya jaminan atas pinjaman yang diajukan sesuai plafond yang diambil. Nantinya jaminan akan dianalisis mampu tidaknya untuk menutupi pinjaman yang diberikan . Masalah bunga juga sering menjadi masalah bagi para nasabah. Nasabah mengharapkan bisa mendapat bunga yang kecil dari kredit yang diajukannya. Bank perlu menimbang lagi apakah bunga yang dikenakan memberatkan nasabah atau tidak. Perbedaan suku bunga antar bank menjadi pertimbangan penting bagi nasabah yang hendak mengajukan kredit.

B. Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dan menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya peneliti melakukan perbandingan untuk menjamin *orisinalitas*. Berikut ini skripsi dan jurnal sebagai sumber perbandingan untuk melakukan penyelesaian permasalahan, beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan yaitu :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Lestari (2020) “Analisis Implementasi 5C dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS MITRA AMANAH”	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.	Dalam mekanisme pembiayaan pada umumnya, mekanisme di BPRS Mitra Amanah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. BPRS Mitra Amanah melaksanakan dari awal proses pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai	Peneliti Sherly Lestari berfokus dalam penerapan 5C dan 7P pada BPRS dengan ketentuan syariah sedangkan penulis hanya berfokus pada prinsip 7P pada BPR
2.	Ratnasari (2024) “Analisis Pemberian Kredit Pada PT BANK PANIN Tbk CABANG SINTANG”	Dalam metode ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Prinsip pemberian Kredit 5C dan 7P, pihak bank juga melakukan analisis berbagai aspek, seperti aspek hukum, ekonomi, sosial, pemasaran, amdal, dan lainnya. Dengan tujuan agar kualitas Kredit yang	Peneliti Evy Ratnasari berfokus pada prinsip kredit 5C dan 7P serta pihak bank sudah melakukan analisis dari berbagai aspek sementara penulis hanya berfokus

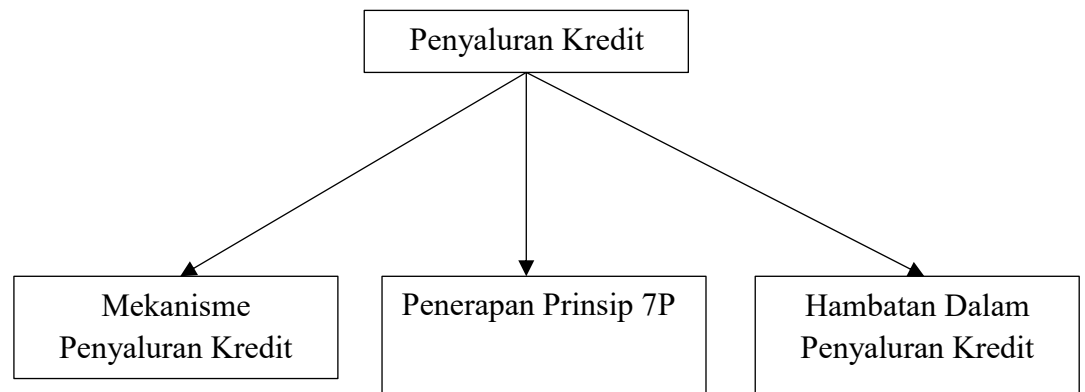
			diberikan baik. Semakin berkualitas Kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit bermasalah.	pada prinsip 7P serta belum dilakukan secara lengkap analisis dan aspek lainnya.
3.	Anjani (2023) “Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Terhadap Perkembangan UMKM”	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme.	Pengaruh kredit usaha mikro terhadap pertumbuhan UMKM adalah sebesar 30,5% dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini mempengaruhi sisanya sebesar 69,5% .	Peneliti Ni Gusti menekankan penyaluran kredit pada UMKM dan menghitung pertumbuhannya, sedangkan penulis tentang penyaluran kredit secara umum dengan prinsip 7P.
4.	Octavia (2022) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Umum Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi”	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan metode filsafat positivisme.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat suku bunga, modal usaha, jangka waktu kredit, dan pendapatan nasabah terhadap permintaan kredit umum pada PT BPR Bank Boyolali.	Peneliti Maya Octavia memfokuskan pada permintaan kredit bagi pelaku UMKM, sedangkan penulis mengacu pada bagaimana penyaluran kredit dilakukan.
5.	Rangian & Wokas (2021) “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit di PT	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.	Bahwa pengendalian intern dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bukopin Finance Graha Manado belum sepenuhnya selesai dengan kerangka kerja	Peneliti Melisa, Grace, Heinie mengacu pada pengendalian internal sedangkan penulis mengacu pada penyaluran kredit.

	BUKOPIN FINANCE GRAHA MANADO”		pengendalian internal COSO.	
6.	Maharani (2024) “ Analisis Mekanisme Pengajuan Pinjaman Kredit (Studi Kasus PERUMDA BPR Bank Kota Bogor)”	Jenis penelitian ini menggunakan n penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Teknis prosedur pinjaman sudah sesuai dengan SOP pengajuan pinjaman. Prosedur yang telah ditentukan menunjukkan adanya validasi data, teknis pinjaman dan kemampuan bayar merupakan hal yang perlu diperhatikan secara detail. Restrukturisasi menjadi salah satu cara penanganan kredit bermasalah.	Peneliti Maharani menjelaskan mengenai SOP yang diterapkan sedangkan penulis menekankan pada proses penyaluran kredit dan hambatannya.
7.	Mutiara (2023) “ Analisis Penerapan <i>Prudential Principle</i> Melalui Aspek Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal Cabang Adiwerna”	Jenis penelitian ini menggunakan n penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.	Penerapan <i>Prudential principle</i> dalam pemberian kredit pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal Cabang Adiwerna belum diterapkan secara optimal. Beberapa prinsip 5C dan 7P belum diterapkan dengan <i>prudential principle</i> .	Peneliti Mutiara mengacu pada penerapan <i>prudential principle</i> pada prinsip 5C dan 7P sementara penulis hanya menekankan pada prinsip 7P secara mendetail.
8.	Sitanggang (2022) “ Penyaluran Kredit Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha	Jenis penelitian menggunakan n penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.	Penyaluran Kredit mikro PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM belum berjalan dengan baik dan masih mengalami	Peneliti Sitanggang menekankan penyaluran Kredit berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sedangkan penulis mengenai

	Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Perawang”		hambatan seperti Kredit macet yang dialami. Hambatan berasal dari internal pihak bank sendiri.	penyaluran Kredit dengan prinsip 7P.
--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2024

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Mekanisme Penyaluran Kredit Beserta Hambatannya Pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam pengajuan kredit dengan mengisi formulir kredit yang disediakan. Formulir kredit disesuaikan dengan tujuan pinjaman dari nasabah, maka pihak bank perlu mengetahui tujuan nasabah mengajukan kredit. Lalu tanda tangan permohonan kredit oleh *Customer Service* atau AO kredit. Kemudian AO melakukan *BI Checking* untuk mengetahui riwayat kredit nasabah baik di bank umum ataupun bank swasta. Setelah dipastikan tidak ada masalah AO dan Analis Kredit melakukan survei dan wawancara langsung dengan debitur. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan persyaratan kredit dan menganalisis calon nasabah. Data nasabah akan diserahkan kepada Analis Kredit untuk dianalisa kemampuan bayar dan usahanya. Hasil dari proses analisa akan ajukan di komite kredit yang terdiri dari Kepala Cabang, Ketua Bidang (Kabid) Pemasaran, AO Kredit, dan juga Analis Kredit untuk memperoleh keputusan kredit. Jika disetujui maka data-data nasabah akan diberikan ke bagian operasional untuk proses pencairan kredit melalui pembuatan Surat Keterangan Kredit (SPK). Plafond kredit diatas Rp 10.000.000

memerlukan pengikatan notaris saat akad kredit. Berkas nantinya akan dimintakan tandatangan dari Kepala Cabang, Kabid Operasional, Kabid Pemasaran, dan AO Kredit.

2. Prinsip 7P mampu menjadi tolak ukur dalam penyaluran kredit. Prinsip *personality* (kepribadian) diketahui bahwa kepribadian dapat dinilai dengan wawancara langsung dengan nasabah. Pada prinsip *party* (pengelompokan) diketahui bahwa pihak bank mendalami kondisi keuangan/modal usaha nasabah. Bank perlu mengetahui penghasilan usahanya atau dari. Pada prinsip *purpose* (tujuan) diketahui bahwa pihak bank perlu mengetahui tujuan kredit untuk menentukan produk bank yang sesuai. Tujuan kredit ada beragam seperti investasi, modal usaha, konsumtif, renovasi, dan sebagainya. Pada prinsip *prospect* (prospek) diketahui bahwa kemampuan bayar nasabah akan diukur dari prospek yang dimiliki. Nasabah yang memiliki prospek bagus semakin berpeluang kredit dicairkan. Pada prinsip *payment* (pembayaran) diketahui bahwa kemampuan bayar nasabah dilihat dari pendapatan dan keadaan usahanya. Keadaan usaha yang baik dan perusahaan yang *bonafit* menjadi penilaian bank. Pada prinsip *profitability* (profitabilitas) diketahui bahwa kemampuan usaha dalam menghasilkan laba penting bagi bank. Semakin tinggi laba maka semakin besar peluang kredit dicairkan.. Pada prinsip *protection* (perlindungan) diketahui bahwa saat pengajuan kredit perlu menyertakan jaminan. Kredit Rp 5.000.000 kebawah tidak perlu menyertakan jaminan (*wanprestasi*), namun jika memiliki wajib

menyertakan. Jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan serta berupa BPKB motor dan mobil.

3. Hambatan yang dirasakan pihak bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat antara lain persaingan dengan BPR-BPR swasta dan bank umum dari segi bunga, kurang lengkapnya data nasabah, dan pemasaran yang harus lebih menjangkau masyarakat. Saat ini banyak bank umum yang bergerak di bidang mikro, dari segi bunga sulit bersaing dengan bank umum namun dengan BPR-BPR swasta masih dapat bersaing. Nasabah yang mengajukan kredit, saat dimintai syarat-syarat masih kurang merespon. Bagian pemasaran khususnya yang turun ke lapangan untuk lebih bisa menjangkau masyarakat dan lebih aktif menawarkan produk-produk yang ada di BPR.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran, diantaranya yaitu:

1. Debitur

Mengajukan kredit bukanlah suatu proses yang cepat dan butuh waktu. Oleh karena itu, masyarakat terutama debitur mampu memberikan syarat-syarat kredit yang diperlukan lebih lengkap. Sehingga tidak menghambat proses pencairan kredit. Kemudian dalam wawancara diharapkan untuk bersikap jujur dan terbuka agar penilaian kredit lebih relevan dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo

Adanya prinsip 7P diharapkan membantu dalam proses pencairan kredit. Persaingan bisnis memang tidak bisa dihindarkan dan pasti akan mengalami setiap bisnis. PT BPR BKK JATENG hanya perlu melakukan pendekatan dengan masyarakat agar mereka tertarik akan produk yang ditawarkan. Bunga bank yang tidak terus naik sangat diharapkan nasabah. Memberikan hadiah berupa undian akan semakin menarik minat masyarakat. Untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka dalam menganalisa kredit harus dilakukan secara mendalam agar tidak salah dalam menganalisa. Syarat-syarat kredit baiknya diberikan di awal dan dijelaskan lebih detail agar nasabah tidak lupa. Bagian pemasaran wajib memahami produknya secara mendalam untuk menjangkau masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, E., Putri, A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). *Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah*. 7(2), 185–196.
- Hastuti, H. (2022). *Analisis Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia Makassar Unit Manggala* (Vol. 9). Universitas Bosowa.
- Istirana, T. (2020). *Analisis Prinsip 5C dan 7P Pada Penyaluran Kredit (Studi Kasus : PT. BPR Prima Mulia Anugrah Gunung Pangilun Padang)*. Universitas Muhamadiyah Sumatra Barat.
- Maharani, D. C. (2024). *Analisis mekanisme pengajuan pinjaman kredit (studi kasus Perumda BPR Bank Kota Bogor)*. Universitas Pakuan.
- Melisa Magda Rangan, G. B. N., & Wokas, H. R. N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Di PT Bukopin Finance Graha Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 415. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32197/30555>
- Mutiara, S. (2023). *Analisis Penerapan Prudential Principle Melalui Aspek Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal Cabang Adiwerna*. Politeknik Harapan Bersama.
- Ni Gusti Mayang Anjani. (2023). *Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada PT. Bank X Unit Mikro Cabang Denpasar)*. Politeknik Negeri Bali.
- Octavia, M. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Umum Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.
- Putri, S. F., & Yunita, I. (2024). *Pengaruh risk profile , good corporate governance (GCG), earnings (profitability), and capital (capital adequacy), terhadap pertumbuhan laba pada bank syariah*. 10(3), 641–650.
- Rahayu, F. S., Samsiah, S., & Hinggo, H. T. (2021). Analisis Prinsip 5C Dan 7P Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1(2), 20–27.
- Ratnasari, E. (2024). Analisis Pembarian Kredit Pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Sintang. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22(1), 153–161. <https://doi.org/10.51826/fokus.v22i1.1076>
- Saputro, D. (2023). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada BRI Unit Sawitto)*. Institut Agama Islan Negeri Parepare.
- Sasmita, T., Puspitasari, R., & Rosita, S. I. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>
- Sherly Lestari. (2020). *Analisis Implementasi 5C dan 7P Dalam Upaya*

- Pencegahan Pembiayaan Murahabah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah.* Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Sitanggang, O. (2022). *Penyaluran Kredit Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Perawang.* Universitas Lancang Kuning.
- Sofyan, M. (2021). *Kumpulan Hasil Penelitian Bank Perkreditan Rakyat* (Mohammad Sofyan (ed.); Cetakan Pe). CV ODIS. <https://cvodis.com/>
- Sri Asfirawati, Farida, Husni Sulaiman, Andi Nurul Faizah, Adi Candra, D. H. (2023). Pelatihan Strategi Marketing Mix 7P Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Account Officer di PT BPR Pataru Laba Cabang Bulukumba). *Abdimas Galuh*, 5(1), 824–830.
- Wijoyo, H. (2020). *Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri TIN : Terapan Informatika Nusantara.* 1(4), 157–162.
- Yasin, A., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sebelum dan Pada Pandemi Covid-19. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 9(2), 142. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v9i2.10011>
- Zhafirah, L., Sudarma, A., & Suherman, A. (2024). Analisis Sistem Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada PT BPR Supra Artapersada Kantor Pusat Operasional). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 5(1), 137–149. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10743>